

BAB I

PENDAHULUAN

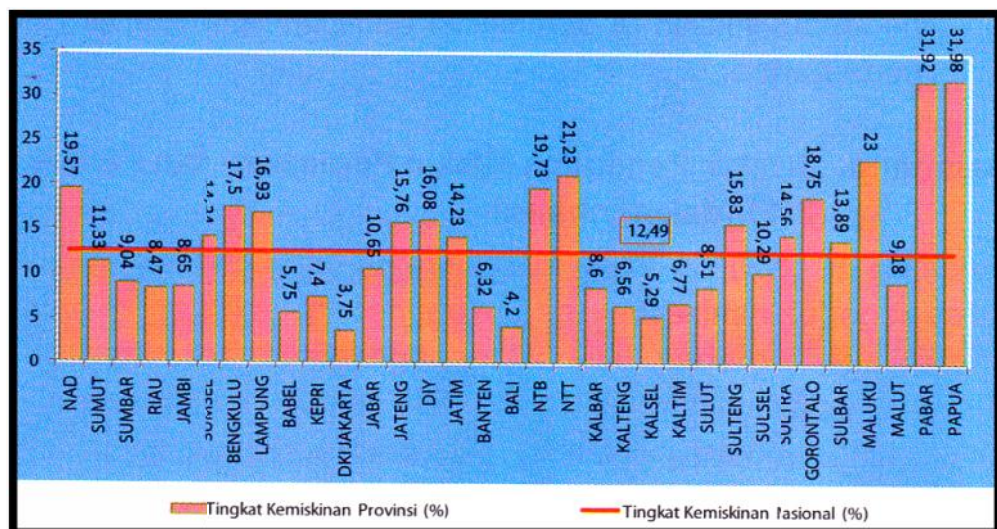
A. Latar Belakang Masalah

Krisis moneter yang melanda hampir seluruh negara berkembang, khususnya negara-negara ASEAN, pada tahun 1997 secara tidak langsung diyakini telah membawa pengaruh terhadap munculnya masalah-masalah sosial. Kekuatan krisis ekonomi itu seakan telah mengguncang dan menggoyahkan kemapanan negara-negara Asia Tenggara. Distribusi kekayaan dan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tidak menentu akibat krisis ekonomi telah mengakibatkan peningkatan angka kemiskinan yang cukup signifikan. Jumlah rakyat yang berada di bawah garis kemiskinan pada tahun 1996 adalah sekitar 34,01 juta orang maka setelah krisis ekonomi jumlahnya meningkat tajam hingga menjadi 47,97 atau sekitar 50 juta orang. Jumlah penduduk miskin pada tahun 1996 tersebut terdiri dari 9,42 juta orang di perkotaan dan 24,59 juta di perdesaan. Sedangkan jumlah penduduk miskin pada tahun 1998 terdiri dari 17,60 juta penduduk miskin di perkotaan dan 31,90 juta di perdesaan (Berita Resmi Statistik No. 43/07/Th. XII, 1 Juli 2009).

Di Indonesia krisis ekonomi diperburuk dengan terjadinya krisis multidimensional yang melanda negara republik ini, krisis kepercayaan, krisis kepemimpinan, dan krisis moral telah menjadi pelengkap permasalahan, yang menjadikan masalah bangsa ini semakin kompleks.

Krisis ekonomi juga menjadikan distribusi kekayaan dan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tidak menentu.

Data BPS menunjukkan secara umum, angka kemiskinan Indonesia sejak tahun 1998 sampai dengan 2011 terus menurun. Pada tahun 1998, tingkat kemiskinan nasional adalah 24,23% atau 49 juta orang sedangkan pada tahun 2011, tingkat kemiskinan nasional adalah 12,49% atau 30 juta orang. Penurunan tersebut tidak lepas dari upaya keras pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan melalui berbagai program pro-rakyat. Kendati belum bisa dikatakan maksimal, akan tetapi tren penurunan menunjukkan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah telah memberikan efek positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi masih terdapat disparitas (perbedaan) antar provinsi. Ada provinsi yang berhasil menurunkan persentase penduduk miskinnya dengan cepat dan ada pula yang lambat. Gambar 1 berikut menggambarkan profil kemiskinan beberapa provinsi di Indonesia tahun 2010:



Gambar 1. Profil Kemiskinan Per Provinsi Tahun 2011

Berdasarkan gambar tersebut terlihat provinsi Papua yang merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan terbesar, sedangkan provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi yang tingkat kemiskinan yang paling kecil. Selain itu sebaran penduduk miskin juga tidak merata di seluruh wilayah kepulauan Indonesia (Dimas Aditya Nugraha, 2011: 11-14).

Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi kedua setelah provinsi DIY, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011 sebesar 5,107 juta orang (15,76 persen) dengan jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan sebanyak 2,093 juta orang (14,12 persen terhadap jumlah penduduk perkotaan) sedangkan sebanyak 3,015 orang (17,14 persen) terdapat di perdesaan (BPS Provinsi Jawa Tengah No.37/07/33/Th. V, 1 Juli 2011 diakses dari jateng.bps.go.id).

Kabupaten Banjarnegara sendiri merupakan salah satu kabupaten termiskin di Jawa Tengah pada tahun 2010 dan masih menjabat status daerah tertinggal. Jumlah warga miskin mencapai 176 ribu jiwa atau 19 persen dari total penduduk kabupaten, jumlah tersebut masih lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 15 persen dan nasional sebesar 12,49 persen (diakses dari jatengnews.com).

Kemiskinan adalah masalah terbesar dan harus diatasi karena dampaknya secara universal sangat mempengaruhi kehidupan manusia, misalnya mengenai keterbelakangan pendidikan dan pembentukan kepribadian seseorang. Kemiskinan seharusnya tidak bisa dijadikan

semacam *justifikasi* (pengabsahan) untuk meminta-minta. Banyak juga orang yang miskin tetapi terus bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Salah satu faktor penyebab kemiskinan adalah lemahnya etos kerja di lingkungan masyarakat, kehilangan pekerjaan, menurunnya daya beli serta harga barang-barang yang melambung naik membuat kondisi semakin parah yang mengakibatkan kemiskinan yang berkesinambungan, sehingga banyak bermunculan orang-orang yang mencari belas kasihan orang lain atau biasa disebut pengemis. Orang yang terbiasa bekerja keras akan lebih bertanggung jawab pada dirinya dalam menghadapi tantangan hidup. Sebaliknya, mental para pengemis yang selalu mengandalkan belas kasihan orang lain, akan lemah dalam menghadapi tantangan hidup.

Meningkatnya kebutuhan hidup merupakan masalah bagi sebagian orang, sehingga mereka melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Tidak terkecuali mengemis, mereka akan selalu mengharapkan belas kasihan orang lain. Bagi sebagian orang, mengemis merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan dijadikan sebagai mata pencaharian. Tidak dipungkiri bahwa kehadiran para pengemis merupakan masalah yang *fundamental* (dasar/pokok) dalam kehidupan masyarakat.

Pengemis merupakan sebuah masalah yang dihadapi hampir semua kota-kota besar di dunia. Hampir setiap perempatan jalan, tempat-tempat

wisata, rumah ibadah, hingga ke perkampungan tak luput menjadi sasaran pengemis.

Keberadaan pengemis dirasakan cukup mengganggu masyarakat, perilaku mereka menimbulkan keresahan masyarakat. Masalah pengemis ini juga rupanya cukup memusingkan pemerintah daerah sehingga mereka berpikir keras untuk mencari jalan keluar dari masalah tersebut, jika dibiarkan kota menjadi kumuh, tetapi bila ditangani akan mendapatkan tentangan dari banyak pihak yang mengatasnamakan pembela hak asasi manusia. Belum ada alternatif penyelesaian masalah tersebut, namun kepolisian sendiri mempunyai payung hukum untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan adanya peraturan tentang penanganan pengemis. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 14 tahun 2007 tersebut yaitu:

“ Tindakan prefentif dilaksanakan untuk mencegah atau mengurangi timbulnya masalah gelandangan dan pengemis dilingkungan masyarakat. Kegiatan tindakan prefentif sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan cara antara lain:

- a. Penyuluhan;
- b. Bimbingan sosial; dan
- c. Pembinaan sosial.

Teknik penanganan kegiatan prefentif sebagaimana dimaksud, antara lain:

- a. Patroli pada tempat-tempat yang kemungkinan atau sering terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta tindak pidana yang dilakukan oleh gelandangan dan pengemis.
- b. Pengawasan secara periodik terhadap aktivitas gelandangan dan pengemis.
- c. Pengawasan ke tempat-tempat yang biasa menjadi persinggahan gelandang dan pengemis.

Cara tindak penegak hukum dimaksudkan untuk membuat jera pelaku agar tidak melakukan kembali aktivitas sebagai gelandangan dan pengemis. Cara tindak penegak yang dimaksud dilaksanakan dalam kegiatan antara lain:

- a. Razia atau penertiban gelandangan dan pengemis;
- b. Penampungan sementara gelandangan dan pengemis untuk diklasifikasi;
- c. Penyidikan;
- d. Pelimpahan perkara ke pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan.”

Diharapkan. Dengan ditetapkannya peraturan tersebut maka masalah pengemis akan teratasi dan aparat pemerintah daerah mempunyai payung hukum untuk membersihkan daerah dari pengemis.

Praktek mengemis merupakan masalah sosial dimana pengemis dianggap telah menyimpang dari nilai dan norma-norma yang berlaku. Pengemis adalah orang sehat dengan kondisi tubuh yang tidak kurang apapun. Profesi pengemis merupakan profesi yang sudah di lakukan sejak dulu yang di jalankan secara turun-temurun. Budaya malas dan selalu mengandalkan belas kasihan orang lain melahirkan sebuah presepsi kurang menyenangkan. Dalam prakteknya sering kita jumpai pengemis adalah orang sehat dengan kondisi tubuh yang tidak kurang apapun.

Kehidupan para pengemis di Dusun Sucen merupakan sebuah fenomena berbeda. Secara ekonomi, kondisi mereka dapat dikatakan berkecukupan atau berkehidupan mapan dan dapat dikatakan sejahtera. Kesejahteraan meliputi kesehatan, ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup masyarakat. Sebenarnya masyarakat Dusun Sucen lainnya yang tidak bekerja menjadi pengemis kurang setuju akan adanya pengemis di dusun mereka. Mengingat mereka yang termasuk dalam kategori orang yang mampu dan dapat memberikan citra negatif pada dusun tesebut.

Ketidaksetujuan masyarakat Dusun Sucen yang lain tidak menjadikan mereka serta merta mau berganti pekerjaan dengan begitu saja.

Selain itu, juga pernah ada wujud perhatian dari pemerintah dalam hal ini yang pernah dilakukan oleh Satpol PP untuk mengatasi para pengemis. Satpol PP merazia tempat-tempat yang biasa menjadi tempat mangkal para pengemis melakukan aktivitasnya. Tidak hanya itu, para pengemis juga diberikan penyuluhan, tetapi razia dan penyuluhan tersebut tidak seutuhnya menimbulkan efek jera bagi para pengemis, sehingga tidak semua masyarakat Dusun Sucen yang berpekerjaan sebagai pengemis beralih ke pekerjaan lain.

Pengemis di Dusun Sucen saat ini mengalami perubahan. Beberapa diantara pengemis telah berhenti dari profesinya. Namun masih kurang diketahui faktor apa yang menyebabkan pengemis tersebut berhenti dari pekerjaannya, tetapi masalah pengemis di Dusun Sucen bisa menjadi gambaran bahwa sebagian masyarakat sudah mempunyai kesadaran akan budaya yang menyimpang yaitu budaya yang mengandalkan belas kasihan orang lain sedangkan sebenarnya mereka mampu secara ekonomi.

Deskripsi tersebut menggambarkan betapa masalah pengemis menjadi masalah sosial yang kompleks, lebih dari sebuah realitas yang selama ini dipahami masyarakat luas. Oleh sebab itu, diperlukan penanganan khusus terhadap masalah pengemis, agar tidak menimbulkan keresahan. Selain itu dalam menangani masalah pengemis diperlukan juga

adanya kesadaran, pemahaman yang komprehensif, baik dalam tatanan konseptual, penyusunan kebijakan sampai kepada implementasi kebijakan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui gambaran kehidupan pengemis di Dusun Sucen. Untuk itu peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Studi Kasus Kehidupan Pengemis Di Dusun Sucen Desa Mantrianom Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang dikemukakan, dapat diidentifikasi permasalahan yang bersangkutan dengan pengemis, yaitu:

1. Fenomena pengemis sangat jelas dapat dilihat diperkotaan juga di perdesaan.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya pengemis di Dusun Sucen belum diketahui secara pasti.
3. Masalah-masalah yang muncul akibat aktivitas pengemis.
4. Banyak warga Dusun Sucen yang menjadi pengemis tetapi berkehidupan mapan.
5. Faktor-faktor yang menyebabkan pengemis berhenti dari profesinya belum diketahui.
6. Pola kehidupan pengemis di Dusun Sucen kurang diketahui secara pasti.

7. Kurangnya upaya dan perhatian dari pihak pemerintah.
8. Kurangnya upaya dan perhatian dari masyarakat sekitar.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka masalah yang dikaji dalam penelitian perlu dibatasi. Pembatasan masalah ini bertujuan untuk memfokuskan perhatian pada penelitian agar diperoleh kesimpulan yang benar pada aspek yang diteliti. Selain itu peneliti difokuskan ke dalam beberapa masalah agar tidak terbawa pada persoalan yang terlalu luas.

Penelitian ini difokuskan pada:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya pengemis di Dusun Sucen belum diketahui secara pasti.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan pengemis berhenti dari profesinya belum diketahui.
3. Pola kehidupan pengemis di Dusun Sucen belum diketahui.
4. Upaya-upaya pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara untuk mengatasi pengemis.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah memiliki peran yang penting dalam penelitian, karena rumusan masalah merupakan motor penggerak untuk melakukan sebuah penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah

dan batasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor yang menyebabkan adanya pengemis di Dusun Sucen?
2. Apakah faktor yang menyebabkan pengemis berhenti dari profesinya?
3. Bagaimanakah pola kehidupan pengemis di Dusun Sucen?
4. Bagaimanakah upaya-upaya pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara untuk mengatasi pengemis?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan diadakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan adanya pengemis di Dusun Sucen.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan pengemis berhenti dari profesinya.
3. Untuk mengetahui pola kehidupan pengemis di Dusun Sucen.
4. Untuk mengetahui upaya-upaya pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara untuk mengatasi para pengemis.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari peneltian ini ada dua macam:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai hasil karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penelitian dengan tema yang sama atau relevan sehingga dapat

memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu geografi sosial. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan membuktikan kebenaran fenomena sosial yang terjadi di setiap daerah. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya terkait dengan variabel-variabel tersebut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Mengembangkan daya pikir dan penerapan ilmu sosial yang telah dipelajari di perkuliahan terkait dengan studi kasus pengemis di Dusun Sucen.

b. Bagi Masyarakat Dusun Sucen (Pengemis)

Memberi masukan agar mereka mau beralih pada pekerjaan lain khususnya bagi mereka yang mengemis dan diharapkan perhatiannya dari masyarakat sekitar.

c. Bagi Pemerintah

Memberi perhatian yang lebih terhadap keberadaan pengemis yang ada.

d. Bagi mahasiswa lain

Dapat digunakan sebagai bahan referensi atau kajian untuk pengembangan penelitian selanjutnya.